

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
INTISARI.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	12
1. Lintasan Teori Perundang-undangan.....	12
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	16
3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik	23
B. <i>Good Regulatory Practices</i> : Suatu Tinjauan Prinsip	2

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Alat Pengumpulan Data.....	38
E. Jalannya Penelitian	38
F. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Regulatory Practices</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	42
1. Telaah Historis Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.....	42
a. Pembentukan Undang-Undang Periode Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949)	44
b. Pembentukan Undang-Undang Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950)	55
c. Pembentukan Undang-Undang Periode Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959)	64
d. Pembentukan Undang-Undang Periode Kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1959-Sekarang)	68
1) Sebelum Perubahan.....	68
2) Setelah Perubahan	79

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Sebagai Prinsip-Prinsip <i>Good Regulatory Practices</i> di Indonesia	101
3. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Regulatory Practices</i> dalam Beberapa Undang-Undang.....	136
a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	137
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	147
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	150
d. Pengujian Terdahulu Mengenai Undang-Undang yang Bertentangan dengan Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-Undang	159
4. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Regulatory Practices</i>	169
a. Lemahnya Analisis dan Evaluasi	170
b. Belum Adanya Mekanisme <i>Review</i> yang Baik.....	173
c. Keterbatasan Partisipasi Publik.....	176

B. Penerapan Ideal Prinsip <i>Good Regulatory Practices</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	178
1. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Regulatory Practices</i> Secara Institusional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	182
a. Koordinasi Internal	183
b. Penilaian <i>Regulatory Impact Assessment</i>	190
c. Urgensi Konsultasi Publik	199
2. Urgensi Penataan Kembali Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	201
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	206
B. Saran.....	208
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perhitungan waktu legislasi 2017-2019	133
Tabel 4.2. Penyebarluasan 10 RUU Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan 2016.....	135
Tabel 4.3. Metode analisis yang dapat digunakan	193

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Target dan Capaian Program Legislasi Nasional Periode 2005- 2014.....	127
--	-----

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang dalam BP-KNP (1945-1946) Periode Undang-Undang Dasar 1945.....	54
Bagan 4.2. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang dalam BP-KNP (1947-1949) Periode Undang-Undang Dasar 1945.....	55
Bagan 4.3. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang mengenai Usul Pemerintah dari Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950)	62
Bagan 4.4. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang mengenai Usul DPR dari Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950)	63
Bagan 4.5. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang mengenai Usul Senat dari Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950)	64
Bagan 4.6. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang Periode Undang- Undang Dasar Sementara (1950-1959).....	68
Bagan 4.7. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 dan Penetapan Presiden Nomor 28 Tahun 1960 Periode Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	71
Bagan 4.8. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 32 Tahun 1964 Periode Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	72
Bagan 4.9. Alur Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR 1971-1997 Periode Sebelum Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	78

Bagan 4.10. Alur Pembicaraan Tingkat I.....	95
Bagan 4.11. Alur Pembicaraan Tingkat II	96
Bagan 4.12. Langkah-Langkah Metode RIA	199